



RELAWAN UNTUK  
ORANG & ALAM

CRITICAL  
ECOSYSTEM  
PARTNERSHIP FUND



## Semiloka Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Rencana Pengelolaan Zonasi

### Perkumpulan Relawan Orang dan Alam

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "STRATEGI PEMANFAATAN SDA PESISIR, LAUT DAN P3K BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH". The slide content includes:

- SUSTAINABLE** (green circle)
- WISATA, TRANSPORTASI, MATA PENCAHARIAN, PANGKAN** (orange circle)
- Kawasan Konservasi P3K (Reserve)** (yellow box)
- SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN P3K** (blue circle)
- Industri/Masyarakat Pesisir dan P3K (User)** (yellow box)
- RZWP3K controlling** (yellow box)

Arrows indicate relationships: Reserve and User boxes point to the central blue circle. The central circle points to the Sustainable and Tourism/Transportation/Income/Fishing circles. The RZWP3K controlling box points to the central circle. The Sustainable and Tourism/Transportation/Income/Fishing circles also have arrows pointing to the central circle.

The Zoom meeting grid on the right shows several participants: EDWARD YUSUF, Subarkah, Samliok Nidobe, mryous., Sayfoel Soedien, and a banner for "BANGGAI PERAIRAN" and "KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN".

**LAPORAN AKHIR PROYEK**

**Maret 2020 – Mei 2020**

## **INFORMASI PROYEK**

Wilayah Pendanaan : PFA 4  
KBA : Perairan Balantak  
Strategic Direction (s) : Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut  
Nomor Laporan : 01  
Periode Waktu : 5 Maret 2020 – 15 Mei 2020  
Disampaikan Oleh : Mochammad Subarkah  
Tanggal : 28 Mei 2020

### Hibah Proyek:

(a) dalam USD : : 11,648.20  
(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 161,910,000

Kontribusi Mitra : Alokasi staf, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi Donor (Program) lain (jika ada): -

Periode Proyek : Maret 2020 – Mei 2020

Lembaga Pelaksana (Mitra) : Perkumpulan Relawan Orang dan Alam

## II. RINGKASAN

### 1. Kondisi dan Perkembangan proyek secara umum

Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 telah disahkan ditindaklanjuti dengan penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah Kawasan Konservasi adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik secara tahunan maupun dalam jangka-menengah (5 tahunan) dan jangka-panjang (20 tahun).

Mengingat tujuan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ), maka dipandang perlu untuk merumuskan sebuah kesepakatan implementasi di tingkat tapak hingga ke provinsi agar program dan kegiatan saling terintegrasi dan sinergi. Seiring dengan ditetapkannya Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sulawesi Tengah dan pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) desa yang dicapai dalam Program Kemitraan Wallacea.

Pencapaian Program Kemitraan Wallacea dalam pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat di tingkat tapak diantaranya empat DPL di Banggai yaitu di Desa Uwedikan, Lambagan, Louk dan Kelurahan Talang Batu dan dua DPL di Kabupaten Banggai Laut yaitu desa Bone Bone dan Desa Dungkean serta lokasi perlindungan habitat *Banggai cardinal fish* di desa Bone Baru dan desa Popisi telah berhasil diintegrasikan dalam pencadangan KKP Banggai Dalaka.

Dari capaian itu, dipandang perlu melakukan kajian dan analisis pengelolaan KKP Dalaka pasca pengesahan dan zonasi agar masukan dari para pemangku kepentingan di Banggai Dalaka dapat diakomodasi dan terangkum pada zonasi dan rencana sinergi pengelolaan para pemangku kepentingan.

#### **Tujuan**

Menyediakan ruang konsultasi para pemangku kepentingan terkait dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Banggai Dalaka.

#### **Hasil**

Para pemangku kepentingan memberikan masukan dalam proses penataan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan

Banggai Dalaka yang bersinergi dan saling terintegrasi dengan inisiatif masyarakat di tingkat tapak.

### **Tempat dan waktu**

Workshop Semiloka Pengelolaan KKP Dalaka pasca pengesahan dan zonasi, akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Labuan Bajo, 4 – 5 Maret 2020 : Penguatan kapasitas Dinas Kelautan Perikanan dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tentang reformulasi anggaran berbasis ekologi yang dapat mendukung implementasi RPZ Banggai
2. Webinar meeting online Pengelolaan KKP Banggai dan Rencana Pengelolaan Zonasi
3. Kampanye dan Diseminasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Rencana Pengelolaan Zonasi serta Perlindungan kawasan laut dan pesisir di Banggai

### **Penyelenggaraan**

Kegiatan Pengelolaan KKP Banggai pasca pengesahan dan zonasi dilaksanakan oleh Relawan Orang dan Alam (ROA) Sulteng bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan pendanaan RIT-CEPF Wallacea.

### **Peserta**

Seluruh rangkaian kegiatan dalam hibah ini melibatkan para stakeholder baik di level Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akademisi serta NGO termasuk masyarakat di wilayah KKP Banggai.

## **2. Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan**

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa capaian-capaian penting yang dapat dihasilkan diantaranya:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Lembaga ROA mendapatkan pengetahuan mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi.
2. Informasi dan rencana kelola kawasan konservasi perairan Banggai dan Rencana Pengelolaan Zonasi terbuka dan transparan
3. DKP Sulawesi Tengah meminta peran serta para pihak dalam mewujudkan target 700.000 hektar kawasan konservasi di wilayah Sulawesi Tengah

4. Tersosialisasikan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan RZP di Banggai dan perlindungan kawasan pesisir dan laut di Banggai.

**3. Perubahan Asumsi dan Resiko serta respon/tindakan lembaga**

Dalam proses pelaksanaan program kegiatan awalnya direncanakan akan dilaksanakan sesuai rencana awal namun sekaitan dengan terjadinya pandemi corona-19 yang melanda Indonesia dan di wilayah Sulawesi Tengah mengakibatkan proses pelaksanaan program kegiatan sempat terhambat dikarenakan adanya pembatasan sosial.

Menyikapi situasi tersebut maka dilakukan komunikasi dengan Burung Indonesia terkait kegiatan yang mengalami penundaan dan disepakati model kegiatan dan strategi pelaksanaan diubah disesuaikan dengan situasi dalam masa pembatasan sosial.

Komunikasi yang intensif antara ROA dan Burung Indonesia akhirnya menyepakati kegiatan bisa dilaksanakan dengan mengubah item kegiatan dan melakukan perubahan anggaran sehingga proses tetap bisa berjalan dalam situasi masa pandemi covid-19.

**4. Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir(projek)**

Capaian hingga pelaporan akhir program kegiatan ini sebagaimana yang secara ringkas diutarakan sebelumnya baik pemerintah daerah di level provinsi dan kabupaten, akademisi serta lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat berkontribusi terhadap tujuan kegiatan yakni terbangunnya ruang komunikasi dan sharing informasi serta pengalaman termasuk rencana-rencana konservasi di wilayah perairan Banggai.

Hal itu ditunjukkan dengan beberapa pemaparan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dan adanya upaya perluasan wilayah konservasi seluas 700.000 hektare sebagai indikator rencana DKP Sulteng mendatang dan pengelolaan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi.

### **III. CAPAIAN**

Dukungan program dalam beberapa item kegiatan secara umum ingin mencapai tujuan yang diharapkan menyediakan ruang konsultasi para pemangku kepentingan terkait dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Banggai.

Capaian ini tentunya dengan mendorong para pihak atau pemangku kepentingan memberikan masukan dalam proses proses penataan zonasi dan rencana

pengelolaan kawasan konservasi perairan Banggai Dalaka yang bersinergi dan saling terintegrasi dengan inisiatif masyarakat di tingkat tapak.

#### **A. Objective**

Terbukanya ruang konsultasi para pemangku kepentingan terkait dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Banggai Dalaka

Objektive telah dicapai dengan telah dipenuhinya beberapa indikator sebagai berikut:

1. UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai direkomendasikan untuk dibentuk UPTD Kelas A berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KepmenKP/2019 tentang penetapan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mencadangkan sebesar 700 ribu hectare kawasan konservasi perairan membutuhkan dukungan pemangku kepentingan.
3. Tersedianya Data dan Informasi serta peran pemangku kepentingan dalam konservasi perairan.
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat Mengetahui Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Ekologi Melalui Penandaan Anggaran Hijau

**Indikator 1:** UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai direkomendasikan untuk dibentuk UPTD Kelas A berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KepmenKP/2019 tentang penetapan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Tengah yang meliputi empat wilayah dengan luasan total mencapai 1,7 Juta Hektare demikian yang disampaikan Moh. Edward Yusuf, SP, M.Si menyikapi pengelolaan kawasan yang begitu luas dan disadari memiliki beragam tantangan dalam mengelolanya.

Disebutkan UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai direkomendasikan untuk dibentuk UPTD Kelas A berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KepmenKP/2019 tentang penetapan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

UPTD tersebut diharapkan dapat membantu dan mendekatkan pelayanan baik dalam hal perlindungan wilayah konservasi maupun pengelolaannya mengingat wilayah kawasan konservasi Banggai yang cukup luas dibanding dengan wilayah kawasan lainnya yang telah ditetapkan.

Namun demikian, Edward tidak menampik bahwa dukungan para pihak tentunya juga sangat berperan dalam mendukung, menjaga dan melindungi wilayah kawasan konservasi di Banggai, Banggai Laut maupun Banggai Kepulauan sehingga bisa bersinergi bahkan bekerjasama dalam pengelolaan maupun perlindungan wilayah kawasan konservasi pesisir, pulau-pulau kecil.

Edward selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mengapresiasi apa yang telah dilakukan kawasan LSM seperti ROA, SIKAP dan Japesda atas dukungan Burung Indonesia serta CEPF yang telah bersama-sama masyarakat membentuk kelompok-kelompok daerah perlindungan laut di beberapa lokasi diantaranya di Uwedikan, Talang Batu, Luok, Bone-Bone dan Dungkean yang tentunya memiliki tujuan untuk memanfaatkan, mengelola, melestarikan dan melindungi wilayah yang telah ditetapkan menjadi daerah perlindungan laut oleh kelompok di desa.

Kecamatan Luwuk Timur sebelumnya bukan menjadi wilayah pencadangan konservasi akan tetapi kemudian menjadi wilayah kawasan zona merah akan tetapi berkat fasilitasi dan kajian ilmiah yang dilakukan di Desa Uwedikan karena fasilitasi oleh LSM Japesda maka Uwedikan akhirnya ditetapkan menjadi salah satu wilayah kawasan konservasi.

Salah satu bentuk-bentuk keterlibatan para pihak telah diwujudkan oleh lembaga yang selama ini bekerja di wilayah Banggai dan Selaku pihak yang berwenang dan berkompeten sangat menghargai kerja-kerja tersebut demi upaya bersama dalam mengelola kawasan konservasi di wilayah Banggai.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dalam tahun 2020 telah mengagendakan empat kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati diantaranya pertama adalah penyediaan data series kawasan konservasi dan sudah terlaksana, kedua kawasan zona inti yang telah ditetapkan, ketiga publikasi hewan laut yang dilindungi serta keempat peningkatan peran serta masyarakat di kawasan konservasi.

Dari keempat kegiatan tersebut, baru satu yang bisa terlaksana sedangkan tiga diantaranya terpaksa belum bisa dilaksanakan karena wilayah Sulawesi Tengah juga mengalami wabah Covid-19 sehingga terjadi perubahan yang mendasar dalam implementasi kegiatan yang telah direncanakan pada 2020 terpaksa harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

DKP Sulteng telah merencanakan kegiatan-kegiatan di wilayah kawasan konservasi akan tetapi bencana non alam Covid-19 melanda wilayah Sulteng dan harapannya agar wabah ini bisa segera berakhir agar rencana dapat diwujudkan kembali.

**Indikator 2:** Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mencadangkan sebesar 700 ribu hectare kawasan konservasi perairan membutuhkan dukungan pemangku kepentingan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mencadangkan sebesar 700 ribu hectare kawasan konservasi perairan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Moh Edward Yusuf, SPI, MS.i pada kesempatan pertemuan webinar yang diselenggarakan Relawan Orang dan Alam bersama Burung Indonesia beberapa waktu lalu.

Pencadangan seluas 700 ribu hectare ini tentunya juga butuh dukungan para pihak seperti kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini konsern dalam kegiatan-kegiatan konservasi di wilayah-wilayah pesisir dan laut serta pulau terkecil yang ada di Sulawesi Tengah dan harapan yang sama para akademisi serta masyarakat juga turut berperan serta dalam pencapaian tersebut.

Dalam kesempatan tersebut DKP Sulteng yang diwakili oleh Edward menyampaikan pengalaman mengenai menyusun regulasi RZWP3K. Pertama-tama yang dirasakan adalah apakah bisa untuk menyusunnya karena begitu banyak yang harus dipenuhi. Namun berkat keterlibatan dan keseriusan dalam menyusunnya akhirnya Perda RZWP3K tersebut bisa ditetapkan.

Awalnya DKP Sulteng tidak yakin namun penyelesaian Perda tersebut akan tetapi dengan semangat dan keseriusan maka akhirnya bisa juga direalisasikan dan harapannya dokumen menjadi pegangan bersama dan bukan sekedar hanya menjadi dokumen yang tersimpan dilemari akan tetapi benar-benar menjadi pedoman dan alas dasar untuk pembangunan.

Edward menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian menjawab pertanyaan peserta diskusi webinar yang merasa khawatir terkait dokumen yang dihasilkan hanya menjadi sebuah dokumen belaka tidak direalisasikan dalam proses pembangunan. Hal lainnya juga yang menjadi pertanyaan peserta adalah menyangkut model monitoring yang dilakukan mengingat pada awalnya kewenangan berada di wilayah kabupaten namun kemudian beralih ke tingkat provinsi.

Dalam diskusi Webinar Edward menjelaskan bahwa memang banyak pertanyaan hal demikian ketika mereka melakukan diskusi publik ditingkat kabupaten terkait pelimpahan kewenangan tersebut namun akhirnya semua pihak dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dan monitoring dapat dilakukan bersama seperti yang telah dibuat dan dilaporkan oleh masyarakat kepada mereka dan ditindaklanjuti.

Terkait hal monitoring, Relawan orang dan Alam bersama kelompok DPL telah melakukan peningkatan kapasitas dan menguji bersama teknik sederhana melakukan monitoring terkait kondisi wilayah pesisir, lamun dan terumbu karang di wilayah mereka. Memang masih perlu sering dilakukan sebagai proses belajar monitoring sehingga bisa dengan mudah menyusun sebuah data dan informasi yang baik terkait kondisi ekosistem di wilayah DPL.

Monitoring bisa dilakukan oleh komunitas di desa secara mandiri bahkan bisa membangun kerjasama dalam melakukan upaya-upaya penyelamatan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut agar tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga.

**INDIKATOR 3:** Tersedianya Data dan Informasi serta peran pemangku kepentingan dalam konservasi perairan.

Data dan informasi yang benar serta peran stakeholder penting dalam konservasi perairan yang dikaitkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ). Hal itu ditekankan oleh DR Ir. Samliok Ndobe, M.Si pada pertemuan webinar tematik Pengelolaan Kawasan Perairan Konservasi Banggai yang diselenggarakan Relawan Orang dan Alam bersama Burung Indonesia.

Akademisi sekaligus peneliti dari Universitas Tadulako tersebut mengulas bahwa tidaklah mudah dalam mewujudkan wilayah konservasi perairan jika tidak memiliki data dan informasi yang akurat terlebih lagi minimnya peran serta para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam membuat sebuah kesepakatan terkait pengelolaan kawasan.

Data dan Informasi valid harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah harus tepat, lengkap bahkan terkini dan Stakeholders (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, LSM ) seharusnya terlibat secara efektif, representatif, dengan perwakilan yang memahami pentingnya RZWP3K serta memiliki kemampuan untuk melakukan peran mereka masing-masing dalam proses.

Prinsip pemanfaatan kawasan konservasi Perairan berdasarkan PP No.60/2007 Mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan habitat atau ekosistem, melaksanakan aktivitas sesuai dengan zonasi dan peruntukannya, memperhatikan daya dukung dan daya tampung dan paling penting adalah melibatkan masyarakat.

RZWP3K dan RPZ menjadi penting karena kawasan pesisir, di daratan dan pulau-pulau kecil rawan diantaranya sangat banyak aktivitas dan kepentingan yang berbeda dan ekosistem yang penting namun mudah terdegradasi. Olehnya Perlu kerangka kebijakan yang mengatur, mengimbangi kepentingan stakeholders secara adil, menjaga sumberdaya secara berkelanjutan dan membuka peluang pembangunan menuju masa depan yang lebih baik.

Khusus wilayah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Banggai di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut tercatat seluas 869.059,94 hektare merupakan kawasan yang terluas dari tiga kawasan konservasi lainnya di wilayah Sulawesi Tengah dan hal itu tentunya bukan hal yang mudah dalam mengelola kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil.

Samliok sekaligus akademisi di Universitas Tadulako menyatakan bahwa Tantangan RZWP3K dan RPZ antara lain yakni bagaimana menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan terkini serta analisisnya yang tepat dan menyeluruh.

Hal lainnya adalah menyangkut ketelibatan stakeholders secara aktif dan efektif, termasuk partisipasi perwakilan instansi atau pihak yang tepat misalnya pengambil kebijakan, ahli di bidangnya, representative termasuk pembagian ruang dan alokasi aktivitas yang sesuai dan jelas untuk saat ini dan periode ke depan.

Semua itu tidak mudah kemungkinan besar tidak dapat tersusun dengan sempurna dan atau kondisi berubah, maka revisi dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali terkecuali dalam berbagai kondisi tertentu. Sangat penting adanya monitoring dan evaluasi RPZ sebagai bagian integral dari siklus manajemen adaptif pada tahun ke-5 penilaian dan revisi sudah mantap dan siap untuk diproses.

Idealnya, RPZ mendukung pengelolaan kawasan yang holistic dan tangguh terhadap perubahan dan hal yang dapat maupun sulit diprediksi. Salah satu aspek adalah diversifikasi dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor atau aspek.

Suatu kelemahan RPZ Taman Pesisir Banggai misalnya adalah Visi yang hanya mengedepankan satu sektor "Mewujudkan Pengelolaan Taman Pesisir Banggai dan Perlindungan Banggai Cardinal Fish yang Efektif, Produktif, Berdayaguna dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Pariwisata Bahari yang Berkelanjutan". Sektor wisata bahari dan lainnya sangat labil, seperti terbukti saat ini dengan wabah covid-19 atau sebelumnya dengan aksi teroris dan lain-lain.

Sebaiknya fokus pada sektor perikanan sebagai sektor unggulan. Potensi perikanan berkelanjutan dinilai besar, apalagi jika jalur untuk nelayan skala kecil dapat dijamin aman dari perikanan destruktif baik lokal dan dari luar daerah dan skala besar dan habitat dikelola dengan baik.

**Indikator 4:** Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat Mengetahui Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Ekologi Melalui Penandaan Anggaran Hijau

Pelaksanaan pelatihan selama dua hari di labuan bajo dengan tema ; kegiatan Pelatihan Anggaran Hijau : Mendorong Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Ekologi dengan di hadiri sekitaran 37 peserta yang turut terlibat dalam proses diskusi, adapun lembaga atau instansi pemerintah yang ikut terlibat antara lainnya Roa Sulteng, Bappeda Sulteng,Dkp Sulteng,Dinas Pupr Manggarai Barat,Bapeda Manggari Barat,Dinas Pertanian Manggarai Barat ,Dinas Pariwisata Manggarai Barat,Bapeda Halmahera,Bapeda Gorontalo, Bapeda Pohnpei,Bappeda Bangkep,Selanggar,Burung Indonesia,Anggota Dprd Pohnpei

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari di labuan bajo yang melibatkan NGO dan pemerintah guna melatih bagaimana cara mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi sehingga di tiap wilayah baik itu propinsi ataupun kabupaten bisa melihat program yang berkaitan dengan lingkungan khususnya searah dengan perbaikan ekologi serta mendorong setiap instansi sampai tingkat desa agar lebih memperhatikan pola perbaikan lingkungan dengan serius menjaga alam

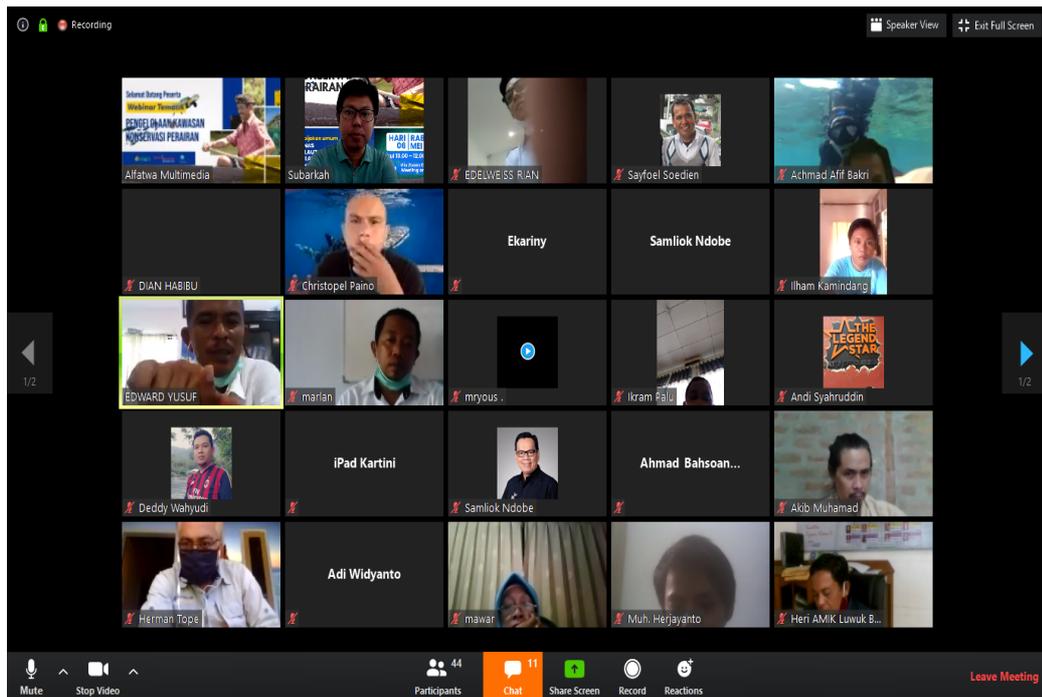
## **B.Output**

**Output 1:** Para pihak di tiga kabupaten mendapatkan informasi tentang rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan Banggai terkait rencana administrasi, peralatan dan infrastruktur, kemitraan, penegakan hukum, anggaran dan keuangan, tata waktu implementasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan mata pencaharian alternatif, komunikasi dan penjangkauan, koordinasi antar lembaga dan masalah yang muncul.

Tercapainya output 1 dari indikator 1 hingga 3 dapat terpenuhi berdasarkan kontribusi dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

### 1. Meeting online para pihak

WEBINAR Meeting online Kebijakan Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Sulawesi Tengah Dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Rencana Pengelolaan Zonasi (RZP) Banggai dilaksanakan pada 6 Mei 2020 dengan menghadirkan narasumber dari DKP Sulteng, Akademisi dan perwakilan NGO dan diikuti dari berbagai pemangku kepentingan.



Kegiatan diskusi melalui pendaftaran online ini diikuti oleh 53 orang dari 82 yang ikut mendaftarkan diri. Diskusi yang berlangsung selama dua jam membahas pengelolaan kawasan konservasi laut dengan metode pemaparan materi oleh masing-masing narasumber dengan waktu 15 menit perorang.

Narasumber yang ikut terlibat dalam diskusi kawasan konservasi laut :  
Dr. Ir. H. Samliok Ndobe ( Akademis) Moh Edward Yusuf, Spi, M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, DKP Propinsi SULTENG) Saiful Sudin ( Dolpin Indonesia)

**Webinar**

# PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

**TEMA** kebijakan umum  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SULAWESI TENGAH  
dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan RZP Banggai

**HARI | RABU**  
**06 | MEI**  
Pukul 10.00 – 12.00 Wita  
Via Zoom Cloud Meeting online

Scan untuk Daftar: [s.id/daftarwebinaroa](https://s.id/daftarwebinaroa)

Scan untuk akses Webinar: [s.id/webinaroa](https://s.id/webinaroa)

Informasi Selengkapnya: [roa.or.id/webinar](https://roa.or.id/webinar)

**NARASUMBER**

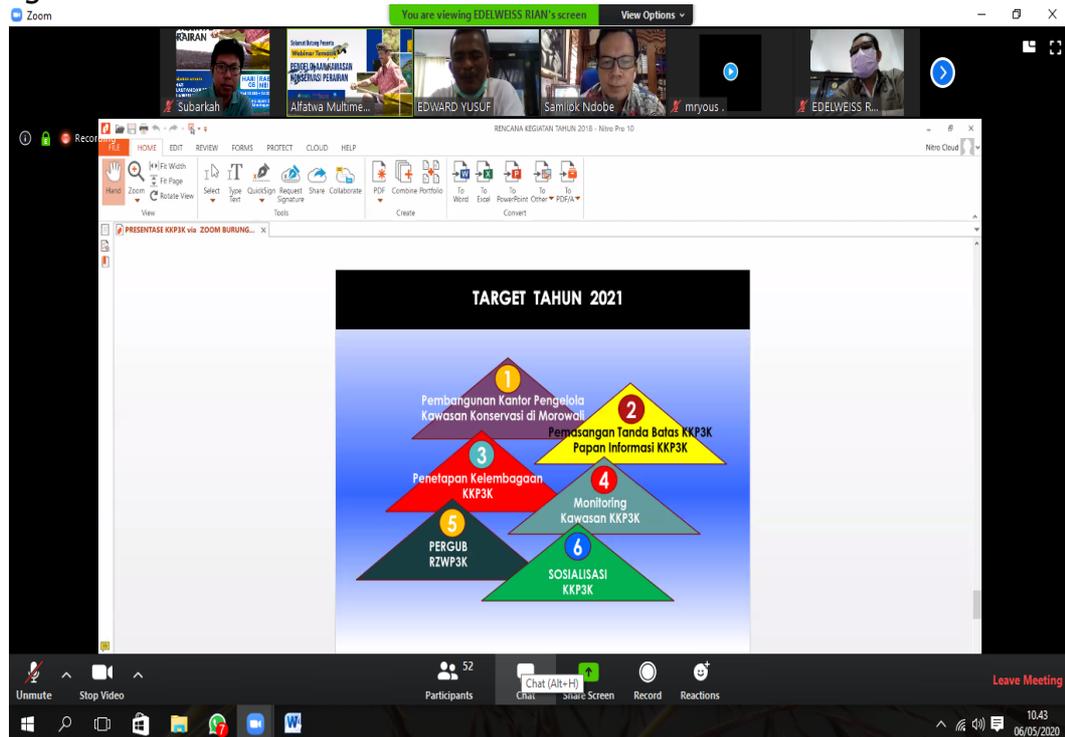
- Moh Edward Yusuf, Spi, MSc**  
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut
- Dr. Ir. H. Samliok Ndobe, M.Si**  
Akademisi dan Peneliti Universitas Tadulako
- Saiful Sudin**  
Dolphin Indonesia

25 PESERTA YANG BERUNTUNG, AKAN MENDAPATKAN MERCHANDISE

Diskusi online (Webinar) yang di mulai pada pukul 10.00-12.00 wita, dengan 53 orang yang ikut terlibat dari hasil analisis, pengamatan maupun hasil dari penelitian langsung di lapangan menggambarkan alur penetapan wilayah kawasan konservasi laut di Sulawesi Tengah terlebih khusus di wilayah Banggai sangat memberikan kontribusi dan pengetahuan dalam memahami dasar penetapan kawasan konservasi laut serta memberikan gambaran kelemahan dan keberhasilan dalam menjalankan perda RZWP3K.

Perencanaan dalam perbaikan segala kelemahan di lapangan tetap selalu diupayakan dengan menggunakan metode pendekatan yang lebih

aktif pada masyarakat khusus yang masuk dalam kawasan konservasi agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.



2. Pembuatan Newspaper, disusun dan disebarluaskan di kawasan Konservasi Perairan Banggai.

Penyebaran informasi melalui newspaper terkait Tata Kelola Wilayah Konservasi dan Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) di Banggai yang dirangkum dari hasil pendiskusian dan wawancara narasumber yang dilakukan yang selanjutnya diperbanyak dan di distribusikan di seluruh wilayah yang masuk kawasan konservasi perairan Banggai sebagai salah satu upaya menyebarluaskan informasi mengenai rencana pengelolaan kawasan konservasi Banggai.

Newspaper siap didistribusikan



Newspaper KabarOa

Melalui media ini diharapkan masyarakat maupun pemangku kepentingan yang berada di wilayah kawasan konservasi perairan kelak dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta upaya perlindungan secara kolaboratif bersama pemangku kepentingan lainnya.

3. Pemasangan billboard sebagai upaya kampanye perlindungan dan pelestarian kawasan pesisir dan Laut. Pemasangan bildboard merupakan salah satu kegiatan kampanye dalam rangka penyelamatan dan pelestarian serta perlindungan pesisir dan laut kegiatan pemasangan ini dilakukan di Kota Luwuk, Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok.



Proses pengangkutan Bildboard ke Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai

Namun demikian proses ini sedikit mengalami kendala terkait perizinan lokasi pemasangan bildboard di luwuk sedangkan untuk di Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok tidak mengalami hambatan dikarenakan lebih mudah proses perizinannya yang dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan kelompok DPL di masing-masing wilayah. Keberadaan bildboar juga akan menjadi fundrising bagi pemerintah kelurahan dan desa serta kelompok DPL sehingga mereka mendapat manfaat langsung dari sarana yang disediakan tersebut.



Pemasangan Billboard di Kelurahan Talang Batu

**Output 2:** Adanya peningkatan pemahaman tentang konsep dan implementasi dari perencanaan dan penganggaran hijau serta Meningkatnya keterampilan teknis dalam penandaan anggaran hijau dalam mewujudkan visi – misi pembangunan daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tercapainya output 2 dari indikator 4 terpenuhi berdasarkan kontribusi dari kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Anggaran Hijau : Mendorong Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Ekologi

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial tidak bisa dipisahkan dengan target keberlanjutan ekologi. Bahkan bisa dikatakan bahwa keberlanjutan ekologi merupakan prasyarat dasar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Karena itulah maka pembangunan berbasis ekologi menjadi sangat penting, yang diwujudkan-nyatakan melalui perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan nilai ekologi, berikut pelaksanaannya.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi ini adalah masih terbatasnya pemahaman dan kemampuan teknis dalam menterjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang relevan.

Karena itu dibutuhkan peningkatan kapasitas teknis tertentu untuk mendesign perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi dimaksud. Salah satu alat yang bisa dipakai untuk peningkatan kapasitas teknis tersebut adalah penandaan anggaran "hijau" atau "*green*" *budget tagging*.

Penandaan dan perencanaan anggaran "hijau" adalah alat yang efektif untuk mengukur capaian dari visi - misi kepala daerah dan mengukur kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu sendiri.

Penandaan dan perencanaan anggaran "hijau" ini juga akan membantu tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan akuntabel terutama untuk mewujudkan pembangunan "hijau". Pengarus-utamaan pembangunan "hijau" dalam pembangunan daerah menganut sistem perencanaan penganggaran yang menyeluruh, transparan, tepat sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk Berbagi informasi tentang konsep dan implementasi dari perencanaan dan penganggaran hijau dan Meningkatkan keterampilan teknis dalam penandaan anggaran hijau dalam mewujudkan visi –misi pembangunan daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.



Pelatihan Anggaran berbasis Ekologi di Labuan Bajo

Kegiatan diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi yakni DKP, Bappeda Provinsi dan BLH serta LSM Mitra Burung Indonesia yang dilaksanakan di Labuan Bajo.

Dalam kegiatan tersebut peran kelembagaan atau instansi yang hadir dalam pelatihan ini memberikan sumbangsih atas pemikiran dengan menyampaikan pengalaman kerja di setiap sektor serta terlibat dalam upaya dukungan dalam memajukan perbaikan lingkungan dengan saling memberikan masukan terkait mendorong penganggaran hijau di setiap daerah masing-masing.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari di labuan bajo yang melibatkan NGO dan pemerintah guna melatih bagaimana cara mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi sehingga di tiap wilayah baik itu propinsi ataupun kabupaten bisa melihat program yang berkaitan dengan lingkungan khususnya searah dengan perbaikan ekologi serta mendorong setiap instansi sampai tingkat desa agar lebih memperhatikan pola perbaikan lingkungan dengan serius menjaga alam

Pelaksanaan pelatihan selama dua hari di labuan bajo dengan tema kegiatan Pelatihan Anggaran Hijau : Mendorong Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Ekologi dengan di hadiri sekitaran 37 peserta yang turut terlibat dalam proses diskusi.

Peserta yang mewakili masing-Masing Instansi/pemerintah dalam proses diskusi di berikan kesempatan untuk simulasi tentang penandaan anggaran hijau.

Dari hasil yang di dapatkan di pelatihan penggaran hijau tersebut peserta dapat memberikan masukan dan pandangannya di setiap daerah guna ikut berperan penting dalam proses keterlibatan penandaan anggran hijau yang berkaitan langsung dengan lingkungan.

Di setiap lembaga/LSM bisa membangun kerja sama dengan semua instansi di daerahnya masing-masing yang punya program tentang perbaikan lingkungan secara umum.

Respon dari setiap peserta baik yang mewakili lembaganya/LSM atau instansi pemerintah sangatlah baiknya itu dapat di lihat dari pernyataan dari salah satu anggota DPR POHUATO yang akan memasukkan dalam rapatnya tentang bagaimana pengelolaan lingkungan dengan penggaran yang bersifat hijau.

Begitu juga dari peserta lainnya dengan pelatihan ini sangatlah memberikan pengalaman penting tentang bagaimana upaya mendukung perbaikan lingkungan dengan penggaran hijau, memang dalam pelatihan ini masih banyak kelemahan yang di dapat termasuk batas waktu kegiatan yang hanya dua hari. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk saling tukar informasi di setiap daerah dengan menggunakan grup whatsapp (WA).

Kendala lain yang di hadapi setelah paska selasainya kegiatan pelatihan di labuan bajo agenda ROA yang sudah di jadwalkan akan ke wilayah Luwuk Banggai dan Banggai Laut diubah dengan diskusi online yang di akibatkan oleh pembatasan sosial penyebaran wabah virus corona.

#### **Daftar Publikasi Media**

1. <https://beritapalu.com/2020/05/10/kelola-kawasan-konservasi-dkp-sulteng-bangun-uptd-dan-libatkan-para-pihak/>
2. <https://kabarluwuk.com/kabar-daerah/kelola-kawasan-konservasi-dkp-sulteng-bangun-uptd-dan-libatkan-para-pihak/>
3. <https://media.alkhairaat.id/peran-stakeholder-dan-masyarakat-penting-untuk-kawasan-konservasi-perairan/>
4. <https://kabarluwuk.com/kabar-daerah/pelibatan-masyarakat-dalam-perlindungan-ruang-hidup-laut-dapat-dilakukan-bersamaan/>
5. <https://kabarluwuk.com/kabar-daerah/data-dan-informasi-serta-peran-stakeholder-penting-dalam-konservasi-perairan/>

#### IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
Penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang	(perburuan, perdagangan, DII)	Jumlah Ancaman turun dengan prosentasi tertentu di akhir program	(survei/Monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan Pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang mendapatkan peningkatan Pengelolaan	Dokumen verifikasi
KBA Perairan Balantak	Daerah Perlindungan Laut Tanjung Saro	40 hektar (Zona Inti 4 hektar dan zona rehabilitasi 10 hektar zona pengelolaan 26 hektar	Surat Keputusan Kelurahan Penetapan DPL Tanjung Saro
KBA Perairan Balantak	Daerah Perlindungan laut Fajar Indah	21 Hektare	Surat Keputusan Penetapan DPL Fajar Indah

3. Perlindungan Kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Kawasan Konservasi Banggai (Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut)	Kawasan Konservasi Perairan	856.649,13 (Ha)	Peta Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

4. Penerima manfaat

- a. Karakter penerima manfaat (silahkan checklist pada tiap kolom yang relevan)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Komunitas Masyarakat Talang Batu	√	√							√		
Komunitas Masyarakat Luok	√	√					√				
Masyarakat Kabupaten Banggai											√

- b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (laki-laki)	Jumlah Penerima Manfaat (perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses layanan publik (kesehatan, pendidikan dll)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan		

keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan(sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Pelatihan Anggaran berbasis Ekologi di Labuan Bajo	2	1
Meeting online para pihak	60	17
Pembuatan Newspaper	500	500
Pemasangan Billboard	19.311	19.928
<b>Total Penerima manfaat</b>	<b>19.873</b>	<b>20.446</b>

#### 5. Regulasi/Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/kebijakan	Ruang Lingkup(nasional, lokal,desa)	Topik	Hasil yang diharapkan
Perda RZWP3K	Provinsi	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Tata Kelola Ruang Laut yang Berkelanjutan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2019	Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan	Tata kelola kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

#### 6. Jaringan Kerja/Forum Multipihak

Jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari proyek yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian proyek contoh: Forum pengelolaan daerah tangkapan air yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air)

Nama Jaringan/kemitraan	Ruang Lingkup(nasional,lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
Jaringan Sahabat ROA – GM Pelita	Lokal	Menjadi Penggerak Konservasi wilayah pesisir dan laut di wilayah Banggai	2019
Jurnalis Konservasi	Lokal	Menjadi mitra dalam gerakan	2019

		konservasi	
--	--	------------	--

#### 7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam produktif yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan Laut	4 Hektar	Peta DPL Tanjung Saro
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan laut	21 hektar	Peta DPL Fajar Indah
Zona Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	856.649,13 (Ha)	Peta Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

## V. PEMBELAJARAN

1. Kegiatan atau Strategi apa yang berhasil dengan baik dan apa yang kurang berhasil? Mengapa demikian dan apa dampaknya?

Seluruh rangkaian program kegiatan berjalan dengan baik sekalipun terdapat perubahan kegiatan dan anggaran yang disebabkan oleh bencana non alam yakni Pandemi Covid-19.

Kegiatan seluruhnya bisa berjalan seiring dengan upaya penyesuaian yang dilakukan sehingga pelaksanaan bisa berhasil dan kordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan bisa dikomunikasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Orang dan Alam atas dukungan Burung Indonesia.

Adapun dampak yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut yakni :

1. Terbukanya informasi mengenai Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan Banggai.
2. Dibutuhkan dukungan pemangku kepentingan (LSM, Akademisi dan Masyarakat) dalam mewujudkan dan mendorong tercapainya rencana pembentukan kawasan konservasi baru seluas 700.000 hektare di Sulawesi Tengah.
3. Data dan Informasi yang valid dalam mendukung pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan di kawasan konservasi perairan.

2. Adakah hal atau kegiatan yang di masa depan sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda (Rekomendasi)?

Dalam pengalaman sebelum-sebelumnya proses kegiatan yang dilakukan selalu berjalan seiring dengan perencanaan yang telah disusun secara baik dan lembaga ROA secara khusus mencatat dalam pelaksanaan program bersama Burung Indonesia telah mengalami banyak pembelajaran seperti pada tahun 2018 wilayah Sulawesi Tengah di landa bencana alam berupa gempa, tsunami dan likuifaksi yang tentunya memengaruhi pelaksanaan program akan tetapi bisa dilanjutkan dengan melakukan pembenahan dan penyesuaian rencana kerja dan terbukti bisa berjalan dengan baik.

Tahun 2020 ini, ROA juga mengalami situasi yang juga dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia yang pada bulan Maret 2020 dilanda Pandemi Wabah Covid -19 yang pada saat itu ROA tengah menjalankan program kegiatan dan sempat mengalami proses yang terhambat.

Namun berkat komunikasi dan kordinasi proses bisa terus berjalan ditengah-tengah situasi pandemi yang melanda akan tetapi dengan strategi dan pola kegiatan yang menyesuaikan situasi dan kondisi turut mendukung suksesnya pelaksanaan program kegiatan.

Dengan situasi dan kondisi serta pengalaman selama menjalankan program yang telah dilalui maka yang menjadi titik poin penting adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak sehingga apapun situasi dan tantangannya tentu dapat diperoleh solusi atau jalan keluar yang dapat mendukung tercapainya pelaksanaan dan tujuan program.

3. Deskripsikan dalam tabel berikut ini:

<b>Isu</b>	<b>Keberhasilan/kurang berhasil</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rekomendasi</b>
Hasil:				
a.Perubahan Pengetahuan	Berhasil membawa perubahan pengetahuan	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan pelatihan anggaran berbasis ekologi  Kegiatan Webinar meeting online	Staf pemerintahan di level Provinsi khususnya DKP, Bappeda Sulteng dan Staf ROA menerima manfaat langsung terkait pengetahuan anggaran berbasis ekologi.	Perlu melakukan analisa anggaran di OPD terkait untuk mendorong anggaran berbasis anggaran ekologi pada penganggaran tahun berikutnya sebagai

			Memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan	implementasi hasil pelatihan
b.Perubahan Sikap	Berhasil membawa perubahan sikap	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan	Para pemangku kepentingan memperoleh akses untuk saling mendukung program pengelolaan kawasan konservasi perairan Banggai	
c.Perubahan Perilaku	Berhasil membawa perubahan perilaku	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan	DKP memberikan ruang bagi Pemangku kepentingan saling memberikan dukungan dalam upaya pelestarian dan perlindungan serta dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan kawasan konservasi perairan Banggai	
Proses:				
Perencanaan	Berhasil	Penyusunan perencanaanya yang baik	Aktivitas kegiatan berjalan	

Pelaksanaan	Berhasil	Penyusunan waktu yang disesuaikan dengan kemampuan baik finansial dan sumberdaya manusia	Aktivitas kegiatan berjalan	
-------------	----------	--	-----------------------------	--

## **VI. STATUS KEUANGAN**

- a. Pemasukan : Rp. 107.480.625
- b. Pengeluaran : Rp. 113.129.700
- c. Saldo : Rp. 5.649.075

Terkait status keuangan dari hasil laporan pengelola keuangan menyebutkan bahwa pemasukan telah sesuai pencatatan dimana pemasukan berdasarkan transaksi yang dikeluarkan oleh Burung Indonesia kepada lembaga pengelola program yang menjadi pemasukan bagi lembaga pengelola.

Lembaga pengelola secara bertahap menerima pemasukan dengan proses termin pertama dan termin kedua yang diproses setelah semua laporan tengah program diterima oleh pihak Burung Indonesia yang secara keseluruhan pencatatan pemasukan oleh keuangan telah mencapai Rp 113.129.700

Dalam kontrak nilai sebesar Rp.161.910.000 atau USD.11,648.20 namun karena terjadi situasi yang dalam kondisi bencana non alam yakni Pandemi Covid-19 maka terjadi perubahan kegiatan dan demikian pula dengan anggaran sehingga nilai anggaran revisi dan disetujui adalah Rp.113.137.500.